



## PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA LAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH

MARLIYATI  
SRI MURTINI  
RESI YUDHANINGSIH  
MOHAMMAD HASANUDIN  
CHRISTINA RETNO GAYATRIE

Politeknik Negeri Semarang  
Jl. Prof. Sudharto, SH, Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

### Article History:

Received : 22/05/2022

Revised : 10/06/2022

Accepted : 21/07/2022

Published : 22/07/2022

### Corresponding author:

marliyati@gmail.com

### Cite this article:

Marliyati, M., Murtini, S., Yudhaningsih, R., Hasanudin, M. & Gayatrie, C.R. (2022). Penerapan E-Government Pada Layanan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah. *Keunis*, 10(2), 50-55.

### DOI:

10.32497/keunis.v10i2.3626

**Abstract.** *Industrial revolution 4.0 which is famous for the phenomenon of disruption of innovation, in the field of government, demands the implementation of information technology systems in the affairs of organizing government services. Electronic applications in the field of government, commonly referred to as e-Government, to optimize the service of certain tasks and functions. Government Resources Management System (GMRS) of Central Java Province, is an integrated system of government of Central Java Province. One of the implementations of the e-Government application available, is the vehicle tax application service, which is named SAKPOLE. The results of the study concluded that the SAKPOLE application for the administration of motor vehicle tax payments had not been fully utilized by motor vehicle taxpayers in Central Java Province. The SAKPOLE application has no effect on motor vehicle tax revenues in Central Java Province.*

**Keywords** : e-Government, Taxpayers, Vehicle Tax

**Abstrak.** Revolusi industri 4.0 yang terkenal dengan adanya fenomena disrupsi inovasi, dalam bidang pemerintahan, menuntut diterapkannya sistem teknologi informasi dalam urusan penyelenggaraan layanan pemerintahan. Aplikasi elektronik dalam bidang pemerintahan, biasa disebut dengan e-Government, untuk mengoptimalkan pelayanan tugas dan fungsi tertentu. Government Resources Management System (GMRS) Provinsi Jawa Tengah, merupakan sistem terintegrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi aplikasi e-Government yang tersedia, adalah layanan aplikasi pajak kendaraan bermotor, yang diberi nama SAKPOLE. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi SAKPOLE untuk administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi SAKPOLE tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata kunci** : e-Government, Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0, telah mendorong perkembangan aplikasi elektronik dalam urusan pemerintahan, yang biasa disebut *e-Government*. *E-Government* dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang mengacu pada prinsip agar kinerja menjadi lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), lebih cepat (*faster*), dan dapat diterima dengan baik oleh penggunanya (*deliverable*). Selain dapat meningkatkan kualitas layanan, aplikasi *e-Government* juga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

Peraturan Pemerintah No.95 tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menyebutkan bahwa diterapkannya *e-Government* bertujuan agar proses pelayanan publik dari penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat dapat lebih efektif, efisien, dan responsif. Tujuan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selain dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam *e-Government* dapat diaplikasikan dengan berbagai bentuk. Pada tingkat yang paling sederhana, dapat berupa halaman web, yang menginformasikan keberadaan suatu institusi secara maya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, dapat berupa aplikasi yang dibuat untuk melayani fungsi tertentu. Pengembangan aplikasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah serta memperluas jangkauan layanan publik (Susanti, 2019).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, "Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya". Pajak merupakan harga yang ditetapkan pemerintah atas fasilitas publik yang dinikmati masyarakat. Pajak juga merupakan sumber kemampuan pemerintah untuk membiayai dirinya sendiri, dengan terlebih dahulu menyediakan sarana publik bagi masyarakat (Rusmana, 2016).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Government Resources Management System* (GMRS) Provinsi Jawa Tengah, merupakan sistem terintegrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi aplikasi *e-Government* yang tersedia, adalah layanan aplikasi pajak kendaraan bermotor, yang diberi nama SAKPOLE (Susanti, 2019). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah. Dengan adanya aplikasi layanan pajak kendaraan bermotor, diharapkan akan dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian tentang kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), telah dilakukan oleh Muchtar dkk pada tahun 2017. Penelitian ini mengambil objek wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik dan terus memenuhi target, sangat berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Muchtar & Dkk, 2017). Pendapatan asli daerah nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah maupun di provinsi. Mengacu pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Barito Utara, maka penelitian ini mengambil sampel penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan aplikasi *e-Government* dalam layanan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mengurangi wajib pajak yang menunggak membayar pajak, dan dapat menaikkan sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terbagi menjadi dua unit pemungutnya, yaitu pajak daerah untuk tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Tarif pajak daerah untuk tingkat provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Tarif untuk pajak daerah tingkat kabupaten atau kota diatur menurut Peraturan Daerah masing-masing (Perbup/Perwali). Tarif tersebut nilainya tidak boleh melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rusmana, 2016).

Berkaitan dengan pajak, terdapat kriteria tentang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan kondisi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sedangkan kesadaran pajak merupakan keadaan pemahaman perpajakan serta bebas dari segala paksaan dari

pihak lain. Evaluasi positif wajib pajak terhadap kinerja fungsi negara oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ummah, 2015). Wajib pajak dapat dikatakan mempunyai kesadaran, salah satunya jika mempunyai rasa sukarela dalam menghitung, melakukan pembayaran serta melaporkan pajaknya. Kesadaran diri wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tanpa penundaan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, karena wajib pajak tahu bahwa pajak sudah ditentukan di dalam Undang-Undang. Wajib pajak tidak akan merasa terbebani, karena negara dapat menggunakan perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan pembangunan nasional.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nurani yang ikhlas dan tulus. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). Peningkatan kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Nawangsasi, 2020) bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan adalah cara membantu atau melayani dalam menyiapkan atau mengurus segala kebutuhan yang diperlukan seseorang (Anam, M.C., Andini, R., 2018). Adanya pelayanan yang baik diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Arfamaini (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Publik menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Adanya sanksi perpajakan seharusnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tingginya sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan berfikir lagi untuk melanggar aturan perpajakan yang sudah ditentukan agar tidak terkena sanksi tersebut. Sesuai dengan penelitian (Juliantri, 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Edukasi tentang pentingnya membayar pajak sangat diperlukan, apabila tingkat pengetahuan wajib pajak semakin tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penyebabnya adalah wajib pajak masih kurang pengetahuan mengenai bagaimana cara menghitung tarif pajak untuk membayar pajaknya dikarenakan pengetahuan tentang perpajakan masih kurang.

Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, masyarakat juga akan lebih memahami perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Jati, 2016) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karnowati dan Handayani (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui dampak diterapkannya aplikasi e-Government dalam layanan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mengurangi wajib pajak yang menunggak membayar pajak. Penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, merupakan unsur penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, dapat mempermudah bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat memperbesar Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Government Resources Management System (GMRS) Provinsi Jawa Tengah, merupakan sistem terintegrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi aplikasi e-Government yang tersedia, adalah layanan aplikasi pajak kendaraan bermotor, yang diberi nama SAKPOLE (Susanti, 2019). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah. Dengan adanya aplikasi layanan pajak kendaraan bermotor, diharapkan akan dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Kemanfaatan aplikasi e-Government dalam layanan pajak yang diberi nama SAKPOLE akan diketahui dari responden yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Manfaat penelitian adalah bagaimana layanan aplikasi SAKPOLE dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan Good Government Governance.

## METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan merupakan *purposive random sampling*, yaitu sampel acak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang diharapkan terkumpul sebanyak 100 sampel, yang merupakan jawaban kuesioner dari para wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis data yang akan diambil dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban kuesioner dari wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Data primer hasil jawaban para wajib pajak kendaraan bermotor, dapat diketahui bagaimana tanggapan wajib pajak atas keberadaan aplikasi SAKPOLE. Jawaban ini dapat mendeskripsikan bagaimana sebenarnya kemanfaatan aplikasi SAKPOLE di masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Metode pengumpulan data melalui data sekunder diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Data sekunder akan memberikan data mengenai berapa besaran kontribusi pajak kendaraan bermotor sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelum dan sesudah adanya aplikasi SAKPOLE.

Metoda analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, untuk melihat perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor, sebelum dan sesudah adanya aplikasi SAKPOLE, serta digunakan untuk menggambarkan keberadaan responden terkait dengan adanya aplikasi SAKPOLE dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah redistribusi, kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah propinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 hanya mencapai 96,91%. Pada tahun 2021, terdapat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 932 Milyar (Solopos.com). Besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor, harus diperbaiki dengan mempermudah layanan wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satunya adalah menggunakan layanan aplikasi SAKPOLE.

Pada tahun 2022 pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari pajak daerah, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok (BPPD Provinsi Jawa Tengah, 2022). Data pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan bulan Juni tahun 2022, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp. 5.982.522.588.150 (42,75%) dari target pendapatan sebesar Rp. 13.995.272.893.000.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, sebanyak 42,75% diperoleh dari pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut, 43,15% berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang berasal dari penerimaan pajak di SAMSAT dan layanan SAKPOLE. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa begitu besarnya penerimaan pendapatan daerah, dari sektor pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu dilakukan penanganan secara khusus terhadap pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Target penerimaan dari pajak kendaraan bermotor tahun 2022 sebesar Rp. 5.521.380.840.000, sampai bulan Juni 2022, belum terealisasi

sebesar Rp. 3.139.045.453.300. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah terealisasi, sebesar Rp. 2.361.541.498.200 berasal dari SAMSAT. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari layanan SAKPOLE sebesar 20.793.888.500. Layanan SAKPOLE hanya menyumbang sebesar 0,87% penerimaan pajak kendaraan bermotor. Layanan di SAMSAT, menyumbang 99% penerimaan pajak kendaraan bermotor. Data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan aplikasi layanan e-government yang diberi nama SAKPOLE.

Terdapat berbagai kendala dalam memaksimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu alasan telat membayar pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak adalah kesibukan atau tidak punya waktu untuk membayar ke kantor samsat. Untuk mengatasi kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan solusi dengan membuat aplikasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diberi nama SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online).

Dari 100 jawaban kuesioner yang diharapkan, terkumpul 68 jawaban dari wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yang berasal dari Semarang, Pati, Kudus, Magelang, Brebes. Sebanyak 66 orang dari 68 orang responden penelitian menyatakan belum mengetahui adanya aplikasi SAKPOLE untuk administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Responden penelitian yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor, sebanyak 43 responden menyatakan belum perlu untuk dibuatkan sistem pembayaran pajak online, karena mereka merasa selama ini tidak mengalami hambatan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT atau mobil keliling.

## KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Government Resources Management System* (GMRS) Provinsi Jawa Tengah, merupakan sistem terintegrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi aplikasi *e-Government* yang tersedia, adalah layanan aplikasi pajak kendaraan bermotor, yang diberi nama SAKPOLE (Susanti, 2019).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya aplikasi pembayaran pajak SAKPOLE ternyata belum banyak dikenal oleh para wajib pajak kendaraan bermotor di kota Semarang. Para responden penelitian menyatakan belum mengetahui adanya aplikasi SAKPOLE untuk administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Responden penelitian yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor, menyatakan belum perlu untuk dibuatkan sistem pembayaran pajak online, karena mereka merasa selama ini tidak mengalami hambatan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT atau mobil keliling. Oleh karena itu, aplikasi SAKPOLE untuk administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor belum bisa mengatasi kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M.C., Andini, R., & H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting*.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1).
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.
- Juliantri, N. K. A. dkk. (2021). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar." *Jurnal Kharisma*, 3.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muchtar, M., & Dkk. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Putri, A. O. B., & Nawangsasi, E. (2020). Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Rusmana, dkk 2016, 1001 Hal Tentang Pajak, SMART, Jakarta
- Susanti Dian, 2019, Tata Kelola Pajak Kendaraan Bermotor di Era Digital, Materi Kuliah Tamu di Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Semarang
- Susanto, A. Kurniasari dan Revi Arfamaini, SE., MA. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*. Volume 5. Nomor 1.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).  
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>